

KONTRIBUSI TEORI CONTIGENCY : UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Jamaluddin Majid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63 Samata Gowa
jamalmajid75@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the contribution of contingency theory through e-government in realizing good governance in the Indonesian government. The type of research used in this study is a qualitative research based on an interpretive phenomenological approach. The research location is in the Indonesian government in nine major cities, namely Surabaya, Bandung, Makassar, DKI Jakarta, Bojonegoro, Samarinda, Malang, Papua, Denpasar. The type of data used in this study is document data obtained through the websites of major cities in Indonesia. Data collection techniques were carried out using library research methods, searching and documentary studies. The results of the study show that the contribution of contingency theory in the application of good governance using e-government is different from each region so that a strong study is needed in the implementation, supervision and evaluation of the government each period. E-government needs to be updated again from each government period so that it can be more useful for the community.*

Keywords: *Contingency theory, Good Governance and E-government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi *contingency theory* melalui *e-government* dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan fenomenologi interpretif. Lokasi penelitiannya yaitu di pemerintah Indonesia di sembilan kota besar yaitu Surabaya, Bandung, Makassar DKI Jakarta, Bojonegoro, Samarinda, Malang, Papua, Denpasar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang diperoleh melalui website kota besar di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, searching dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi *contingency theory* dalam Penerapan *good governance* dengan menggunakan *e-government* dari setiap daerah berbeda-beda sehingga perlu kajian yang kuat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian pemerintah setiap periode. *E-government* perlu diupdate kembali dari setiap periode pemerintahan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Contingency theory, Good Governance dan E-government*

PENDAHULUAN

Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah (Gandia dan Archidona, 2008). Pemerintahan adalah penentu utama untuk pertumbuhan, pembangunan dan pengentasan kemiskinan, pemerintahan juga dapat dilihat sebagai instrumen efektifitas lembaga lembaga masyarakat, jika itu lembaga yang tepat dan efektif maka hasilnya harus pemerintahan yang baik (Dayanandan, 2013). teori kontigensi disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan atau teori situasi. Teori kotingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Menurut Stoner et al., (1996) pendekatan kontigensi atau pendekatan situasional merupakan suatu "pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Dalam membangun dan mewujudkan *good governance*, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu merealisasikan tujuan yang telah kita cita-citakan. Seorang pemimpin, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta, perlu senantiasa membiasakan diri untuk merasa berkewajiban mendengar (*luisterplicht*) apa yang dikatakan oleh masyarakat yang mempunyai hak berbicara (*spreekrecht*). Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama.

Pemerintahan yang yang baik juga dapat dianggap sebagai paradigma baru dibidang manajemen publik, alasannya bahwa pergeseran paradigma neoliberal, murni idiologi pasar gagal dipertahankan nilai nilai manajemen publik (Doorgapersad dan aktan, 2017 & Carcaba dan garcia, 2003) Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai transparansi dan keterbukaan pengelolaan pemerintahan daerah. *Good governance* merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik akan tercapai apabila prinsip prinsip *good governance* terlaksana dengan baik (Setiawan dan Farida, 2016). Partisipasi dari masyarakat sangat penting, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menjadi sebuah akses

bagi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi program pemerintah yang telah direncanakan dan dijalankan, sehingga dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan masukan, ide, kritik, dan lain lain demi meningkatkan kualitas pemerintahan (Anggarini, 2013). Sitio dan Anisykurlillah (2014) menyatakan bahwa pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja, namun penelitian Wanadri dan Astuti (2015) menyatakan bahwa pemahaman good governance tidak berpengaruh terhadap kinerja. Fanani et al. (2008) menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh pada kinerja, namun penelitian Forgy et al. (2000) menyatakan bahwa konflik peran tidak berpengaruh pada kinerja. Penelitian Fisher (2001), Viator (2001), Agustina (2009) dan Rahayu (2002) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran berpengaruh pada kinerja, namun penelitian Fanani dkk. (2008) dan Forgy et al. (2000) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran tidak berpengaruh pada kinerja.

Dari hasil penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi dalam penelitian tersebut. Ho dan Ni (2004) menyatakan bahwa Di Indonesia, inovasi *e-government* sudah diinisiasi sejak beberapa tahun belakangan ini. Selain adanya kebutuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan terintegrasi, pengembangan *e-government* di Indonesia didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dan didukung pula oleh regulasi yang terkait seperti Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, *e-government* semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat (Elisia, dkk 2016).

Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk informasi mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan di suatu daerah. Michael (2002) menyatakan bahwa Masyarakat bebas untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kinerja pemerintah, laporan keuangan, kebijakan pemerintah berikut dokumen pendukung, rencana kerja proyek, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi *electronic government (e-government)* yang bertujuan untuk membentuk sistem pelayanan pemerintahan yang lebih mudah dan cepat dengan menggunakan situs internet, sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Elisia, dkk (2016) mengatakan bahwa dengan penerapan *e-government* di era keterbukaan informasi publik tersebut menjadi pilar penting dalam pemberantasan korupsi dengan melembagakan hak-hak publik dalam mengetahui kinerja dan

akuntabilitas badan-badan publik, sehingga dapat berimbas kepada terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah, dimana konsep ini terdiri dari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum. Pada instansi pemerintahan, Humas bertanggung jawab dalam mengolah informasi kepada publik, serta membangun citra dan menciptakan *goodwill* dan pemahaman publik terhadap lembaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengolah media lokal lembaga, membuat *press release* di media massa, membuat *event* khusus, dan tentunya mempublikasikan program kerja dan kegiatan lembaga pada situs resmi lembaga (Jan, 2009 dan Ho, 2002).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan suatu kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga mendorong setiap daerah untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Nurchayani dan Retnowati, 2015). Peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintahan dewasa ini dirasakan semakin penting. Menyadari akan pentingnya peranan system informasi dalam sistem pemerintahan dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang ini maka dirasa perlu untuk merealisasikannya dalam sebuah aplikasi yang dikenal dengan sebutan *e-government* sehingga dapat mendukung fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang memenuhi kriteria *better, cheaper* dan *faster* (Heryana dan Dewi, 2013). Selain itu diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan (Nurchayani dan Retnowati, 2015).

Kepemimpinan berkaitan dengan masalah mendasar yang memerlukan perhatian dan pemikiran pemimpin yaitu bagaimana melakukan perubahan, pengembangan, dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan gaya kepemimpinan dari gaya kepemimpinan cenderung otoriter dan bersifat mengendalikan menjadi gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif (Harris, 2000). Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada gaya kepemimpinan yang kooperatif, kolaborasi, dan komunikatif. Kepemimpinan tidak lagi memfokuskan pada dimensi teknikal atau operasional, melainkan pada dimensi interpersonal. Pentingnya peran kepemimpinan dalam organisasi mendorong lahirnya berbagai teori kepemimpinan yang memiliki fokus dan perspektif berbeda-beda untuk mengembangkan, membantah, memunculkan teori baru dan menjelaskan fenomena

kepemimpinan dalam organisasi. Salah satu teori kepemimpinan yang cukup kontroversial adalah *contingency theory*. Teori ini di kemukakan oleh Fred E. Fiedler pada tahun 1964, teori ini dinilai penuh kontroversi karena model kontingensi menuai kritikan tajam pada masalah reabilitas dan validitas (Anatan, 2011).

Sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak bukan hanya untuk memimpin kelompoknya sendiri tetapi untuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri (Lawler, 2007). Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Hidup dalam kelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga (Lawler, 2007). Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Manusia adalah makhluk tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk tuhan lainnya (Simich, 1998). Manusia dianugerahi kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan lingkungan dengan baik, khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit (Lawler, 2007). Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Namun kenyataan yang terjadi di dunia saat ini adalah adanya krisis kepemimpinan. Pemimpin banyak yang melakukan pelanggaran hukum sehingga seharusnya tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin (Simic, 1998). Ketika pejabat pemerintah di berbagai tingkat haus kuasa dan terus ingin berkuasa, maka orientasi melayani rakyat semakin sirna sementara ambisi untuk berkuasa semakin mengental. Sejatinya pemimpin adalah pelayan masyarakat, Karena itu seorang pemimpin yang selalu berfikir bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Setiap langkahnya harus bermuara pada kebaikan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi. Dalam membangun dan mewujudkan *good governance* Indonesia, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu merealisasikan tujuan yang telah kita cita-citakan. Seorang pemimpin, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta, perlu senantiasa membiasakan diri untuk merasa berkewajiban mendengar (*luisterplicht*) apa yang dikatakan oleh masyarakat yang mempunyai hak berbicara (*spreekrecht*).

TINJAUAN TEORETIS

Contingency Theory

Menurut Etzioni (1985) dalam buku yang berjudul "*Modern Organization*" menyatakan bahwa teori kontingensi disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan atau teori situasi. Teori Kontingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Menurut Stoner et al., (1996) pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional merupakan suatu "pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Teori kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan pemerintah untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan (Raharjo dan Napisah, 2006). Pendekatan kontinjensi untuk akuntansi manajemen didasari oleh anggapan bahwa tidak ada sistem akuntansi yang tepat secara universal yang dapat digunakan oleh semua organisasi dalam berbagai keadaan. Sistem akuntansi yang tepat tergantung pada keadaan khusus dimana organisasi tersebut berada. Oleh karenanya teori kontinjensi harus mengidentifikasi aspek khusus dari sistem akuntansi perusahaan dimana keadaan dapat didefinisikan dengan pasti dan sistem dapat dicobakan dengan tepat. Teori kontinjensi akuntansi ini menunjukkan suatu upaya dalam penentuan sistem pengendalian yang paling memungkinkan atas seperangkat keadaan yang ada pada suatu organisasi. Teori kontinjensi membantah bahwa desain dan penggunaan sistem pengendalian adalah kontinjensi, Pendekatan pengendalian yang universalistis adalah perluasan teori manajemen ilmiah yang alami. Prinsip manajemen ilmiah menyiratkan satu cara terbaik untuk mendesain proses operasional dalam rangka memaksimalkan efisiensi. Perkembangan prinsip operasional ini ke sistem pengendalian manajemen menyiratkan bahwa harus ada satu sistem pengendalian terbaik yang memaksimalkan efektivitas manajemen (Raharjo dan Napisah, 2006).

E-Government

Indrajit (2005), mengemukakan *e-government* adalah usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. *E-gov* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*. Ketika pemerintah telah berkomitmen mengembangkan *good governance* atau ketatapemerintahan yang baik, maka pelayanan publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat perhatian khusus. Terdapat beberapa pertimbangan terkait hal tersebut (Dwiyanto, 2005): 1. Pelayanan publik adalah ranah dimana negara berinteraksi secara intensif dengan warganya. 2. Pelayanan publik merupakan ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. 3. Pelayanan publik

melibatkan kepentingan semua unsur ketatapemerintahan. Pada intinya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang merata kepada seluruh warganya. Perlu disadari bahwa masyarakat menuntut adanya pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif (Haryatmoko, 2016). Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah sehingga pemerintahpun harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik didalam perumusan kebijakan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi menuju era *e-government* tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta sekaligus membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan pelayanan publik. Pengembangan *e-government* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu (Tochija, 2007): 1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara

Good Governance

Yoserizal, (2014) mengungkapkan tata pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah konsep yang akhir akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep konsep dan terminologi demokrasi, *civil society*, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa lalu, konsep tata pemerintahan yang baik itu lebih dipergunakan dalam reformasi publik. Cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Amanah tersebut tidak akan mungkin terwujud apabila kondisi tata-kelola pemerintahan berlangsung secara tidak tertib dan praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di jajaran aparatur penyelenggara negara masih merajalela. Oleh sebab itu, membangun tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu menjadi agenda utama bangsa Indonesia dari generasi ke generasi (Gemiharto dan Rosfiantika, 2017). Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu: yang pertama asas kepastian hukum artinya Setiap

tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku. Kedua asas tertib penyelenggaraan pemerintahan artinya penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat *transparent* yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Transparan adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. Dalam konteks pembangunan, transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang akan diselenggarakan oleh pemerintah yaitu informasi tentang kebijakan pemerintah Akuntabilitas (*acountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah (Anggarini, 2013). Sedangkan menurut sudarmayanti (2003) *akuntabilitas* merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan yang yang diinginkan dan telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Kontribusi Contingency Theory Melalui E-Government

Teori Kotingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Menurut Stoner et al., (1996) pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional merupakan suatu “pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Indrajit (2005) mengemukakan bahwa, *e-government* adalah usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. *E-gov* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *good government*.

Kontribusi E-Government Dalam Mewujudkan Good Governance

Saat ini telah banyak instansi pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah yang mengembangkan pelayanan publik dengan sistem *e-government* melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Lebih lanjut, terdapat sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemenkominfo) dalam buku panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah (Sosiawan, 2015). Karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya. Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan yaitu terkait penerapan sebuah sitem informasi untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan tuntutan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya sebuah sistem informasi yang diterapkan di instansi Pemerintah maka masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi

terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah seperti informasi kebijakan pemerintah.

Kontribusi *Contingency Theory* melalui *E-Government* dalam Mewujudkan *Good Governance*

Kepemimpinan berkaitan dengan masalah mendasar yang memerlukan perhatian dan pemikiran pemimpin yaitu bagaimana melakukan perubahan, pengembangan, dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan gaya kepemimpinan dari gaya kepemimpinan cenderung otoriter dan bersifat mengendalikan menjadi gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif (Harris, 2000). Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada gaya kepemimpinan yang kooperatif, kolaborasi, dan komunikatif. Kepemimpinan tidak lagi memfokuskan pada dimensi teknis atau operasional, melainkan pada dimensi interpersonal. Pentingnya peran kepemimpinan dalam organisasi mendorong lahirnya berbagai teori kepemimpinan yang memiliki fokus dan perspektif berbeda-beda untuk mengembangkan, membantah, memunculkan teori baru dan menjelaskan fenomena kepemimpinan dalam organisasi. Salah satu teori kepemimpinan yang cukup kontroversial adalah *contingency theory*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan fenomenologi interpretif. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada pemerintah Indonesia di kota-kota besar yaitu Surabaya, Bandung, Makassar, DKI Jakarta, Bojonegoro, Samarinda, Malang, Papua, dan Denpasar.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui jurnal dengan simple sepuluh kota besar di Indonesia. Peneliti mengumpulkan informasi secara penuh menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data diantaranya, Studi pustaka, *Internet searching*, Dokumentasi

Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat yang dapat mengukur ataupun menggambarkan fenomena atau objek yang diteliti atau diamati. Alat yang dapat digunakan dalam instrument penelitian ini yaitu *handphone*, kamera, perekam suara/video, serta alat tulis-menulis.

Metode Analisis Data

Proses pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Reduksi data, yaitu Reduksi data adalah intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. Penyajian data, Interpretasi, Penarikan kesimpulan

Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Uji validitas internal (*kredibilitas*), Uji reliabilitas (*dependabilitas*), Uji validitas eksternal (*transferabilitas*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Surabaya

Kontribusi *Contingency Theory* melalui *E-Government*

Kepala daerah memiliki peran penting dalam melakukan terobosan terobosan dalam membangun daerahnya melalui inovasi-inovasi daerah. Apalagi pada era otonomi daerah dituntut kemandirian bagi daerah untuk membangun daerahnya. Bukan hal mudah bagi pemimpin untuk menciptakan budaya dan gaya kerja yang berbeda dari pemimpin terdahulu. Indonesia, dalam lima tahun terakhir ini telah muncul nama-nama kepala daerah reformasional. Salah satu nama yang menonjol adalah walikota Surabaya, Tri Risma Harini dinobatkan menjadi walikota terbaik ketiga versi *World Mayor Prize* (WMP) 2014. Risma telah melakukan banyak inovasi dalam bidang pelayanan publik, birokrasi, lingkungan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Misalnya saja program *e-government* yang menjadi pioner pertama di Indonesia. Menurut elysia, widahanto (2017) dan farid (2015), mengemukakan bahwa pengembangan pelayanan publik dengan sistem *e-government* melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web disurabaya sudah berjalan dengan baik dengan dukungan dari gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu gaya kepemimpinan telling dari pejabat pejabatnya.

E-Government* dalam mewujudkan *Good Governance

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah merintis penerapan *e-government* sejak tahun 2002. *E-government* pada Pemerintah Kota Surabaya dikelompokkan menjadi dua, yakni dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan *e-government* untuk pelayanan publik (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2017). Dalam hal penerapan *e-government* untuk pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya, terdapat beberapa layanan *e-government* yang telah dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya antara lain: *e-Budgeting*, *e-Project*, *e-Procurement*, *e-Delivery*, *e-Controlling*, *e-Performance*. Menurut elysia, wihadanto, dan sumartono (2017) dan farid (2015) mengemukakan bahwa pengembangan pelayanan publik dengan sistem *e-government* melalui jaringan komunikasi dan

informasi dalam bentuk situs web disurabaya sudah berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan menciptakan *good governance* dalam kota surabaya.

2. Bandung

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Adapun gaya kepemimpinan Ridwan kamil yang menjadi ciri khas beliau dalam memimpin kota Bandung ialah dengan melihat beliau dari sosok Yang tidak Hanya memerintah tapi ikut melakukan. Hal tersebut merupakan point pertama dari gaya kepemimpinan sosok Ridwan Kamil. Menurut Ridwan, perubahan yang ia lakukan adalah dengan melakukan sendiri apa yang ia perintahkan kepada warganya dan turun langsung ke lapangan melihat berbagai permasalahan Kota Bandung. elysia, widahanto, dan sumartono,(2017) mengemukakan bahwa pengembangan pelayanan publik dengan sistem *e-government* melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web disurabaya sudah berjalan dengan baik dengan dukungan dari gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu gaya kepemimpinan selling dari pejabat pejabatnya.

E-Government dalam mewujudkan Good Governance

Beberapa layanan yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait *e government* diantaranya: Layanan lapor.ukp.go.id, sebagai media untuk pelaporan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Layanan *Bandung government official twitter* sebagai media komunikasi terbuka antara pemerintah kota Bandung (termasuk walikota) dengan warga Bandung. Layanan portal tanya jawab Bandung , sebagai media komunikasi dan diskusi tentang kota Bandung. Layanan *Bandung open apps*, sebagai penyedia aplikasi penunjang layanan, komunikasi dan transaksi untuk akses melalui *smart phone*.

3. Makassar

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Dalam kehidupan bangsa sekarang, yang menjadi permasalahan adalah apa dan bagaimana moral kepemimpinan yang semestinya, agar dapat menjadi landasan utama mewujudkan *Good Governance*. Moral Kepemimpinan sangat strategis, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Dalam cerita pewayangan syarat kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin tertuang dalam *astabrata*, yaitu delapan sifat kepemimpinan yang mengemban tugas kenegaraan untuk kemakmuran rakyatnya, dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam sifat alam. Mengingat *Good Governance* berkait dengan sikap, perilaku pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, maka tidak dapat disangkal bahwa masalah moralitas harus dimiliki. Tasmil (2013), Ariyani (2013) dan Nove, dkk (2015), mengemukakan bahwa implementasi e-government dalam kota makassar perlahan sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung oleh seseorang yang menuangkan semua tenaga materi dan pikirannya dalam meningkatkan apa yang direncanakannya yaitu peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam menjalankan apa yang telah direncanakannya. Gaya kepemimpinan yang digunakannya ialah gaya kepemimpinan telling dengan gaya kepemimpinan ini pemerintah akan jelas tugas dalam laju pemerintahan.

E-Government dalam mewujudkan good governance

Pemerintah Kota Makassar membuat beberapa inovasi teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan utama inovasi tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel (*e-government*). Alur kerja seluruh aplikasi yang dikembangkan oleh Kota Makassar telah sesuai dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat mulai dari penyusunan rencana (Musrenbang, Pokkir DPRD, Renstra, Renja), penetapan rencana (penganggaran dan pembahasan program), pengendalian pelaksanaan rencana (*procurement* dan *monitoring*), dan evaluasi pelaksanaan (pelaporan dan evaluasi). Salah satu aplikasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah). Dalam implementasinya, aplikasi ini bersumber dari *business process* Kota Makassar yang diturunkan dalam RPJMD. Melalui instrument *e-government* ini, warga dapat memantau apakah usulan-usulan mereka e-musrenbang diterima hoesin, dkk (2008), Nugraha (2018) dan cahyadi (2003) mengemukakan bahwa pengembangan pelayanan publik dengan sistem *e-government* di makassar masih belum sempurna dan belum bisa mewujudkan *good governance* yang direncanakan.

4. DKI Jakarta

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Kepala daerah memiliki peran penting dalam melakukan terobosan terobosan dalam membangun daerahnya melalui inovasi-inovasi daerah. keberanian Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam menerapkan kebijakan *e-government* di Jakarta. Atas terobosan ini, Pemprov DKI dijadikan sebagai provinsi pertama percontohan."Pak Ahok ini selama dua tahun memimpin Jakarta, bukan main komitmen nya untuk menerapkan *e-government*. Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pemerintahan terbuka cukup baik dan berani. Dalam hal pengelolaan anggaran daerah misalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempublikasikan anggarannya melalui *website* sejak tahun 2011, Hoesin, dkk (2008), Nugraha (2018) dan cahyadi (2003) mengemukakan bahwa pengembangan pelayanan publik dengan sistem *e-government* melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web disurabaya sudah berjalan dengan baik dengan dukungan dari gaya kepemimpinan telling pejabat pejabatnya.

E-Government dalam mewujudkan Good Governance

E-government yang telah diberjalan akan dilanjutkan oleh Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Oktober tahun ini juga memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan pemerintahan terbuka dan mewujudkan *good governance* di dki jakarta. Secara administrasi komitmen tersebut memang belum terlihat dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, tetapi komitmen tersebut pernah disampaikan oleh Ardani Ali Sera yang merupakan ketua tim sukses Anies-Sandi Sebagaimana kota-kota besar di dunia, infrastruktur untuk mendukung penggunaan teknologi di DKI Jakarta sudah cukup memadai. Adanya ketersediaan infrastuktur teknologi yang baik di DKI Jakarta, secara singkat setidaknya dapat dipahami

karena DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia. Sarana prasarana serta fasilitas teknologi seperti internet untuk mendukung berjalannya pemerintahan dan bisnis tentu sangat diperlukan Hoesin, dkk (2008), Nugraha (2018) dan Cahyadi (2003) mengemukakan bahwa pengembangan pelayanan publik dengan sistem *e-government* di DKI Jakarta sudah sangat baik hal ini akan berdampak positif pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Bojonegoro

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Dalam 10 tahun terakhir, Bojonegoro yang dikenal sebagai kota minyak dipimpin Bupati Suyoto. Pria yang akrab disapa Kang Yoto itu memimpin Bojonegoro selama 2 periode. Kang Yoto sebagai pemimpin di Bojonegoro menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sector public, ada elemen yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will* untuk mengembangkan *e-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *e-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (*action*). Satriya (2006), dan Suryaningsum, dkk (2015) mengemukakan bahwa melaksanakan *e-government* di Bojonegoro serta hasil yang telah dicapai hingga saat ini tidak jauh dari keberhasilan seorang pemimpin menahkodai suatu wilayah yang dipimpinnya. Maka mau atau tidak mau konsep *e-government* membutuhkan penyempurnaan diberbagai sisi ialah satunya dengan mengganti gaya kepemimpinannya yang sangat sederhana yaitu delegating akan diubah menjadi telling karna gaya kepemimpinan yang sekarang tidak cocok dengan rencana yang ingin dicapai.

E-Government dalam mewujudkan Good Governance

Pada saat mengembangkan *e-government*, pemerintah akan membangun sesuai dengan kapasitas dan permasalahan yang dihadapi. Umumnya mereka memasukkan beberapa proses dalam *e-government* seperti *e-Musrenbang*, *e-budgeting*, *e-planning*, *e-procurement*, serta *e-monev (monitoring and evaluation)*. "Bojonegoro punya lengkap di semua siklusnya. Proses panjang telah dilalui oleh Bojonegoro untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, secara tepat, cepat dan bermanfaat. Hardita (2017), Satriya (2006), dan Suryaningsum, dkk (2015) mengemukakan bahwa di kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten sebagai percontohan dalam implementasi pengembangan *e-government* dalam mewujudkan *good governance*, hal ini dikarenakan apa yang telah diterapkan disana sudah berjalan sebagaimana semestinya.

6. Samarinda

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Pemimpin merupakan figur sentral yang dapat mempersatukan kelompok-kelompok untuk dapat saling berinteraksi dan mengadakan kerjasama untuk pencapaian tujuan organisasi. Namun kenyataan yang terjadi saat ini baik di tingkat lembaga organisasi tertinggi sampai organisasi tingkat bawah masih terdapat berbagai masalah misalnya ketidakmampuan pemimpin dalam mengatur sebuah

lembaga atau yang biasa dikenal dengan krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini merupakan masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh bangsa ini utamanya dalam membawa dan mengawal perkembangan dan kelangsungan roda pemerintahan bangsa, oleh sebab itu sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu memimpin lembaga/organisasi dengan baik. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Farid Wadjdy. Penerapan *e-government* yang baik dan benar, maka pelayanan pemerintah di Kaltim berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara cepat, efektif, dan efisien sehingga menciptakan tata keola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan *e-government* yang baik dan benar, maka pelayanan pemerintah di Kaltim berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara cepat, efektif, dan efisien sehingga menciptakan tata keola pemerintahan yang baik *good governance hal ini di dukung oleh gaya kepemimpinan participating* (apriyanty 2016).

E-Government dalam mewujudkan Good Governance

Pemprov Kaltim telah dan akan menerapkan pelayanan dengan sistem *e-government*, yakni pelayanan yang berbasis elektronik baik melalui lelang terbuka maupun memberikan informasi segala bidang kepada publik. "Dari penerapan melalui sistem *e-government*, di antaranya Kaltim telah melaksanakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE)," ucap Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Farid Wadjdy. Penerapan *e-government* yang baik dan benar, maka pelayanan pemerintah di Kaltim berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara cepat, efektif, dan efisien sehingga menciptakan tata keola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut apriyanty (2016) dan astuti (2005) *e-government* yang ada di kota samarinda belum berjalan dengan baik dan pada akhirnya *good governance* tidak akan terwujud secara nyata jika komponennya belum berjalan dengan baik.

7. Malang

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Dalam membangun dan mewujudkan *good governance*, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu merealisasikan tujuan yang telah kita cita-citakan. Seorang pemimpin, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta, perlu senantiasa membiasakan diri untuk merasa berkewajiban mendengar (*luisterplicht*) apa yang dikatakan oleh masyarakat yang mempunyai hak berbicara (*spreekrecht*). pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. DRS. H.Sutiaji merupakan wali kota malang yang berhasil menciptakan *e-government*

tetapi belum berjalan dengan baik dikarenakan terkendala di sumber daya manusianya dan gaya kepemimpinan yang belum optimal yaitu gaya kepemimpinan delegating (sudrajat, dkk 2018) dan (astuti, 2005).

E-Government dalam mewujudkan Good Governance

Saat ini Pemerintah Kota Malang tengah serius dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini diungkapkan oleh Walikota Malang dalam salah satu forum dimana sutiaji menjelaskan bahwa: "Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat serta dalam rangka persaingan modern, Pemerintah Kota Malang harus melakukan sebuah terobosan inovasi yang bersifat transparan. Salah satu caranya adalah dengan diwujudkan peresmian *Command Center* pada pertengahan tahun 2017." Lebih lanjut dijelaskan bahwa *command center* yang dimaksud oleh Anton merupakan langkah awal untuk mewujudkan *good governance* di Kota Malang sendiri. Urgensi penarapan *good governance* di Kota Malang dilatarbelakangi oleh berbagai masalah-masalah perkotaan yang umum dihadapi oleh kota-kota.

8. Papua

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik. Khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dalam membangun dan mewujudkan *good governance*, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu merealisasikan tujuan yang telah kita cita-citakan. Seorang pemimpin, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta, perlu senantiasa membiasakan diri untuk merasa berkewajiban mendengar (*luisterplicht*) apa yang dikatakan oleh masyarakat yang mempunyai hak berbicara (*spreekrecht*). pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin.. Gaya kepemimpinan yang ada di provinsi papua tidak berpengaruh pada penciptaan *e-government* gaya kepemimpinannya yaitu delegating (sitokdana dan winarno, 2015)

E-Government dalam mewujudkan Good Governance

Pemerintah Provinsi Papua selama ini memanfaatkan Sistem Informasi *e-government* untuk kepentingan pemerintahan namun secara umum belum optimal karena tidak melalui proses perencanaan yang baik. Untuk menyusun Rencana Strategis Pengembangan *e-government* perlu digali dan dikaji unsur-unsur yang mempengaruhi pengembangan *e-government*. berdasarkan telaah dokumen perencanaan (RPJP, RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo) belum menemukan rencana strategis yang tegas dan jelas untuk mengembangkan *e-government*. Sehingga belum optimalnya Sistem Informasi yang dibangun karena belum adanya perencanaan yang baik (sitokdana dan winarno, 2015).

9. Kota Denpasar

Kontribusi Contingency Theory melalui E-Government

Dalam membangun dan mewujudkan *good governance*, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu merealisasikan tujuan yang telah kita cita-citakan. Seorang

pemimpin, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta, perlu senantiasa membiasakan diri untuk merasa berkewajiban mendengar (*luisterplicht*) apa yang dikatakan oleh masyarakat yang mempunyai hak berbicara (*spreekrecht*). Ray dharmawijaya M merupakan wali kota Denpasar yang berhasil *menciptakan e-government* tetapi belum berjalan dengan baik di karnakan terkendala di sumber daya manusianya dan gaya kepemimpinan yang digunakan adalah gaya kepemimpinan yang rendah tanggungjawab yaitu gaya kepemimpinan *delegating* (lestari, 2015).

E-Government dalam mewujudkan Good Governance

Kota Denpasar sebagai salah satu Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang sangat mendukung penerapan TI dalam proses pembangunan dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar telah mengaplikasikan berbagai aplikasi *e-government* sebagai tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan *clean and good government*. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar merasa perlu adanya acuan tata kelola *e-government* yang efektif. belum menemukan rencana strategis yang tegas dan jelas untuk mengembangkan *e-government*. Sehingga belum optimalnya Sistem Informasi yang dibangun karena belum adanya perencanaan yang baik, *e-government* belum dapat dicapai pada hal ini karna TI dari wilaya belum siap sehingga *good governance* belum dapat tercapai (sitokdana dan winarno, 2015).

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian kami yaitu dalam meningkatkan popularitas publik sangat diperlukan peran dari pemimpin pemimpin yang handal dalam menjalankan suatu sistem yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal seperti peningkatan kinerja publik dalam melaksanakan *e-government* sangat membutuhkan arahan arahan dari seorang pemimpin di suatu daerahnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti transparansi dengan *menciptakan e-government* dalam suatu daerah. Jika pemerintah bekerja sama dengan pemimpin yang baik, jujur, dan mempunyai integritas yang tinggi maka apa yang direncanakan disebuah pemerintahan akan tercapai.karna teori kontigensi atau gaya kepemimpinan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja publik. Selanjutnya jika suatu sistem *e-government* yang di ciptakan berjalan dengan sebagaimana mestinya maka perlahan lahan akan mewujudkan *good governance* yang utuh dengan prinsip prinsip yang ada didalamnya terpenuhi dengan sendirinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menemukan bahwa;

1. Kontribusi *contingency theory* dalam setiap daerah berbeda dalam penerapan *e-government*.
2. Penerapan *good governance* dengan menggunakan *e-government* dari setiap daerah berbeda beda sehingga perlu analisis yang kuat serta ada pengawasan serta pengevaluasian setiap periode.
3. *E-government* perlu juga ditinjau kembali ari setiap pemerintahan yang diteliti agar dapat menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang baik yaitu:

1. Bagi pemerintah yang menerapkan *e-government* sebaiknya penerapannya perlu melihat meninjau dengan menerapkan *kontigensi theory* agar menciptakan *good government*.
2. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan observasi secara langsung di pemerintahan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D. 2013. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 1(2): 201-208.
- Aprianty, D.R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Vol 4 Nomor 4*: 1589-1602.
- Astuti, Sri Yuni Woro. (2005). Peluang dan tantangan penerapan e-governance dalam konteks otonomi daerah. *jurnal ekonomi*. 1(1): 1-15.
- Arnus, S. H. 2016. Peran *E-Government* Dalam Mewujudkan Transparansi pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal ekonomi*. 1(2):34-50.
- Ardichvili, dan alexander. 2001. Leadership styles and work related values of manager and employes of manufacturing enterprise in post communist countries, *human resource development quartely winter*, 12(4): 363-383.
- Alessandro Zattoni And Francesca Cuomo. 2007. Why Adopt Codes Of Good Governance? A Comparison Of Institutional And Efficiency Perspectives. *Economic journal*. 2(1): 21-40.
- Bolang, J. 2014. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Jurnal ekonomi*, 9(2): 36-45.
- Carcaba, A., & García, J. (2003). La información financiera en internet de las corporaciones locales europeas. *Partida Doble*, 144,5 6-69.
- Cristina Crespo, V. R, C. Tamarit and R. Valverde. 2006. Institutional Characteristics And Managers' Perceptions Of Accounting Information: Impact On E-Government Use And Organisational Performance. *Journal management*.1(1): 20-50.
- Campo, Salvatore Schiavo and Pachampet Sundaram. (2002). To serve and to preserve: improving public administration in a competitive world. Asean Development Bank.
- Dash, Satyabrata & Subhendu Kumar Pani. (2016). e-Governance paradigm using cloud infrastructure: benefits and challenges. *Procedia Computer Science* 85 (2016) 843-855.
- Dwiyanto, Agus. (2005). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik. *Jurnal ekonomi*, 1(2): 23-40.

- Elysia V, A. Wihadanto , S. Tono. 2016. *implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan publik yang terintegrasi di indonesia.jurnal ekonomi pemerintahan*, 1(2): 225-235.
- Fanani, Zaenal, Rhenny Afriana Hanif dan Bambang Subroto, 2008, Pengaruh struktur audit, konflik peran, dan ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5 (2) : 139-155.
- Fauzan, M. Bahtarudddin dan H. Nuraini. 2012. Implementasi Pemerintahan yang Bersih dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3): 448-463.
- Gemiharto, I. dan E. Rosfiantika. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia. *jurnal ilmu politik dan komunikasi*, 7(1): 103-116.
- Gandía, J. L., & Archidona, M. (2008). Determinants of web site information by Spanish city councils. *Online In-Formation Review*, 32(1), 35-57.
- Hasibuan, ZA dan Santoso, HB. (2005). Standardisasi aplikasi *e- government* untuk instansi pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB, 3-4 Mei 2005.
- Haryatmoko. (2016). Akuntabilitas pelayanan publik: etika publik, dasar membangun integritas dan profesionalitas. Prosiding Seminar.
- Heryana, Toni Dan S. K. Dewi. 2013. Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 1(1) 38-49.
- Hasibuan, ZA dan Santoso, HB. (2005). Standardisasi aplikasi *e-government* untuk instansi pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB, 3-4 Mei 2005.
- Ho, A., & Ni, A. Y. (2004). Explaining the adoption of E-government features - A case study of Iowa County treasurers' offices. *The American Review of Public Administration*, 34(2), 164-180.
- Ho, A. (2002). Reinventing local governments and the "e-government" initiative. *Public Administration Review*, 62, 434-444.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Jan C. Ott. 2009. Good Governance and Happiness in Nations: Technical Quality Precedes Democracy and Quality Beats Size. *Journal economic*. 1(2): 234-250.
- Kumar, R., dan Best, M. L. (2006). *Impact and Sustainability of E-Government Services in Developing Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu, India*. *The Information Society*. 1(1): 25-39.
- Kamal, M. K. A. M., A. R. Romle, dan M. S. Yusof. 2015. Good governance and organization performance in publik sektor: a proposed framework. *International journal of administration and governance*. 1(4): 63-68.
- Lawler, J. 2007. " leadership in social work: A Case of caveat emport?, *British journal of social work*, 1(2):123-141.

- V. L. López, S. I. Antelo, A. V. Sanmartín, R. Connolly and F. Bannister. 2018. e-Government, Transparency & Reputation: An Empirical Study of Spanish Local Government. *Information system management*. 1(1): 276-293.
- Maries, N. K., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. 2017. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan *Full Day* Mardlatilah Singaraja. *E-journal SI Ak*, 7(1): 1-11.
- Michael K. McCall. 2002. Seeking good governance in participatory-GIS: a review of processes and governance dimensions in applying GIS to participatory spatial planning. International Institute for Geo-Information Science. 1(1): 1-20.
- Muluk, M.R. Khairul. (2001). Lokalisasi dan Globalisasi: tantangan dan peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, *Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Nurchayani D. R. Dan D. Retnowati. 2015. Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. *Seminar Nasional Informatika*, 1(1): 1-20.
- Raharjo, S. T. dan D. Napisah. 2006. Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja kariawan. *Jurnal studi manajemen dan organisasi*. 3(2): 69-80.
- B. C. Prasad. 2015. Institutional economics and economic development The theory of property rights, economic development, good governance and the Environment, *economic journal*, 1(2): 776-790.
- Riley, Thomas B. (2002). Change Management, E-Governance, and The Relationship to E-government. Commonwealth Centre for Electronic Governance.
- Setiawan, I. dan F. Idayanti. 2016. Penerapan Prinsip Prinsip *Good Governance* Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Binamarga Dan Pematusan. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 5(7): 1-22.
- Sudarmayanti. 2003. Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah. *jurnal ekonomi*, 1(2): 21-34.
- Simic, ivana. 1998. Transformation leadership the key to successful management of transformational organization change, university of nis the scientific journal fakta university series : economic and organization, 1(2): 49-55.
- Sitio Ristina dan Anisykurlillah Indah, 2014. Pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, struktur audit terhadap kinerja auditor KAP di wilayah kota Semarang. *Jurnal Accounting Analysis*. 3(3) : 301 - 309.
- Sosiawan, Edwi Arief. (2015). Evaluasi Implementasi E-government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen. *Open Journal System*.
- Tochija, Itoc. (2007). Kebijakan *E-government* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal akuntansi ekonomi*, 1(1): 111-120.
- Widilestariningtyas, O. Dan I. Permana. 2015. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal ekonomi*, 2(2): 65-86.
- Wanadri, Chandra. Christina Dwi Astuti. Pengaruh Budaya Organisasi, Etos Kerja, Independensi Auditor, Integritas Auditor dan Pemahaman Good Governance

terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol. 2 No. 2. 2015. Hal. 129-140

Yoserizal dan K.Tovalini. 2014. Implementasi prinsip akuntabilitas publik dan kaitannya dengan reformasi birokrasi di sumatra barat. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 1(1): 17-39.